

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan hidayah dan karunia yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2023 dapat dilaksanakan.

Rencana Kerja (Renja SKPD) ini disusun sebagai acuan perencanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser dalam penentuan program dan kegiatan tahun 2023. Di dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD ini mengacu pada kebijakan prioritas pembangunan yang dituangkan pada RKPD Kabupaten Paser Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser tahun 2021-2026.

Adapun penyusunan Rencana Kerja SKPD ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Harapan kami semoga Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser ini bisa digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tana Paser, Februari 2022

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER,**

ttd

drh. Boy Susanto, MP
Pembina Utama Muda
NIP 19620729 198903 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	24
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	26
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD	42
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD	46
3.3 Program dan Kegiatan	57
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD	67
BAB V PENUTUP	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2021	8
Tabel 2.2	Rekapitulasi Capaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2021	15
Tabel 2.3.	Pencapaian Pelayanan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser	25
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Paser	28
Tabel 2.5	Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2023	35
Tabel 3.1	Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan	40
Tabel 3.2	Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2023	47
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2023 dan Kondisi Akhir	58
Tabel	Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Tahun 2023	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap OPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-OPD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD. Renstra-OPD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran dari Renstra-OPD tersebut, maka OPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser mempunyai arti yang penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Rencana Kerja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi yang mengacu

pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Rencana Kerja OPD merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Rencana Kerja OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi, mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2023:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2023 (RKPD).
2. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
4. Rencana Kerja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Paser dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Paser ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi kegiatan DPRD sehingga dapat semakin mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan *Good and Clean Governance*. Disamping itu Renja ini juga dimaksudkan sebagai kerangka bagi arah pembangunan untuk 1 (satu) tahun ke depan dalam pencapaian Visi, Misi dan Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Sekretariat DPRD pada akhir tahun anggaran. Sedangkan tujuan penyusunan Renja ini antara lain sebagai berikut:

1. Tersusunnya instrumen Rencana Kerja yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser.
2. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan.
3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai dengan skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan.
4. Tersusunnya program-program pembangunan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Paser.
5. Tersusunnya Rencana Kerja yang merupakan penjabaran dari rencana Strategis sesuai dengan bidang kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser.
6. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Berdasarkan tujuan tersebut, maka Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pegangan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Paser dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui materi secara keseluruhan dari dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser, perlu disampaikan sistematika penyusunan Renja ini, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Paser.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Paser.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser tahun lalu

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja yang diharapkan tahun ini

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.

Berisikan uraian sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Paser.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Paser

3.3. Program dan Kegiatan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini diuraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 dan Peraturan Bupati Paser 4 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan perencanaan program sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
2. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
3. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
4. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
5. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai fasilitator kesekretariatan kedewanan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Paser tahun 2016-2021 adalah "Meningkatkan Kualitas Layanan Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kapasitas dan Kinerja DPRD".

Dari tujuan yang telah ditetapkan, sasaran yang ingin diwujudkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD
2. Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2021

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD 2016-2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD 2021		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2021 (%)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1		4		5		6		10		11	12
	SEKRETARIAT DPRD										
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19 rek	2,853,310,500	19	Rek	652,900,500				Bagian Umum dan Keuangan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional	45 unit	194,575,000	9	unit	33,075,000				Bagian Umum dan Keuangan	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3 jenis	2,814,607,768	3	jenis	600,982,011				Bagian Umum dan Keuangan	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 rekanan	2,545,438,179	1	rekanan	499,377,375				Bagian Umum dan Keuangan	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0				0				Bagian Umum dan Keuangan	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 jenis	723,318,875	60	jenis	167,524,875				Bagian Umum dan Keuangan	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11 jenis	706,297,375	11	jenis	189,574,875				Bagian Umum dan Keuangan	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6 jenis	157,625,000	6	jenis	55,125,000				Bagian Umum dan Keuangan	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45 unit	1,969,845,238	9	unit	379,695,488				Bagian Umum dan Keuangan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	5 jenis	951,080,300	5	jenis	283,254,300				Bagian Umum dan Keuangan	

	Perundang-Undangan										
	Penyediaan Makanan dan Minuman	3 paket	1,983,182,125	3	paket	619,439,625					Bagian Umum dan Keuangan
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	25 keg	5,296,556,000	5	keg	1,731,366,000					Bagian Umum dan Keuangan
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	150 orang	2,670,205,697	30	orang	717,024,767					Bagian Umum dan Keuangan
	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	4 jenis	2,191,359,445	4	Jenis	292,452,237					Bagian Umum dan Keuangan
	Pelayanan Kerumah tanggaan Pimpinan DPRD	3 paket	836,240,977	3	Paket	660,858,345					Bagian Umum dan Keuangan
	Pengamanan Dalam (PAMDAL) Sekretariat DPRD Kab. Paser	100%	668,650,294	100	persen	233,842,014					Bagian Umum dan Keuangan
B	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					2,211,670,125					
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	12 unit	2,035,787,001	0	unit	0					Bagian Umum dan Keuangan
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas		889,012,625	2	unit	222,760,125					Bagian Umum dan Keuangan
	Pengadaan Instalasi Listrik / AC / Air /Telepon		858,412,625	0	unit	222,760,125					Bagian Umum dan Keuangan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan		1,763,200,375	1	unit	431,242,875					Bagian Umum dan Keuangan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		1,552,870,000	2	unit	295,470,000					Bagian Umum dan Keuangan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	40 unit	3,604,371,275	11	unit	662,547,375					Bagian Umum dan Keuangan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	12 unit	683,619,625	4	unit	239,077,125					Bagian Umum dan Keuangan
	Pemeliharaan	120 unit	157,625,000	40	unit	55,125,000					Bagian Umum dan

	Rutin/Berkala peralatan gedung kantor										Keuangan	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala meubelair kantor	150 unit	236,437,500	50	unit	82,687,500					Bagian Umum dan Keuangan	
C	Program peningkatan disiplin aparatur			85	%	735,119,438						
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	600 stel	2,372,008,188	120	stel	735,119,438					Bagian Umum dan Keuangan	
D	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					1,036,427,175						
	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	117 orang	2,963,570,675	39	orang	1,036,427,175					Bagian Umum dan Keuangan	
E	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			100	%	1,879,763						
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	5 dok	55,000,013	1	dok	1,879,763					Bagian Umum dan Keuangan	
F	Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah											
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	105 raperda	28,627,691,813	21	raperda	8,194,248,563					Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	
	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	100 kali	19,071,034,525	20	kali	6,038,624,025					Bag. Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
	Rapat-Rapat Paripurna	200 keg	5,688,758,343	40	keg	1,361,113,425					Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	
	Keg Reses	15	11,856,532,825	90	%	3,344,246,325					Bag. Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	

	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	30 keg	334,774,750	6	Keg	75,300,750					Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	15 keg	11,495,211,888	3	Keg	3,231,929,138					Bagian Umum dan Keuangan
	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah	210 keg	41,428,773,000	42	Keg	11,025,000,000					Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
	Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD	20 raperda	10,695,000,900	4	Raperda	2,600,532,900					Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
	Fasilitas Tenaga Ahli/Kelompok Pakar	10 orang	5,186,126,164	10	orang	1,438,508,484					Bagian Umum dan Keuangan
	Fasilitasi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dan Program Kerja DPRD	6 dokumen	1,693,617,575	2	dokumen	592,296,075					Bag. Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
	Peningkatan Fasilitasi Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD	42 dokumen	3,113,913,400	14	dokumen	1,089,005,400					Bag. Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
	Pembahasan LKPJ Kepala Daerah	9 keg	3,850,652,650	3	Keg	1,346,659,650					Bag. Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
	Pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS APBD	12 Keg	4,800,879,200	4	Keg	1,678,975,200					Bag. Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
	Pembahasan Raperda APBD	9 keg	6,604,550,550	3	Keg	2,309,759,550					Bag. Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
G	Program kerjasama informasi dengan mass media					4,520,773,688					
	Kerjasama Mass Media dan Elektronik	4 media	11,389,339,563	4	media	2,864,653,313					Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
	Publikasi dan Dokumentasi Keg Lembaga DPRD	1300 kali	5,687,727,875	260	kali	1,656,120,375					Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
H	Program perencanaan pembangunan daerah					76,125,000					

	Penyusunan Renstra SKPD	2 dok	94,049,000	0	dok	46,500,000					Bagian Umum dan Keuangan	
	Penyusunan Renja SKPD	5 dok	90,050,000	1	dok	13,125,000					Bagian Umum dan Keuangan	
	Evaluasi Renja OPD	5 dok	14,755,013	1	dok	16,500,000.00					Bagian Umum dan Keuangan	
	Review dan Revisi Renstra	1 dok	10,450,000	0	dok	0					Bagian Umum dan Keuangan	
			217,168,121,584			60,024,687,086						

Pada tabel di atas hanya menyajikan rekapitulasi program dan kegiatan berdasarkan target RPJMD 2016-2021 serta target kinerja dan anggaran RKPD 2021 sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD 2016-2021. Dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku pada tanggal 30 Desember 2020, maka terjadi perubahan pada nomenklatur program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Renja 2021, serta bertambahnya satu nomenklatur baru yaitu sub kegiatan. Dengan diterbitkannya Permendagri pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut, maka terjadi masa transisi dalam nomenklatur program dan kegiatan yang dijalankan oleh SKPD pada tahun 2021, sehingga realisasi kinerja dan anggaran yang ada tidak didasarkan pada program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renja 2021. ditetapkannya Program dan Kegiatan sampai dengan Sub Kegiatan. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tersebut, dalam mewujudkan sasaran Renstra Sekretariat DPRD tahun 2016-2021 maka direalisasikan dalam 2 program, 16 kegiatan, dan 62 sub kegiatan pada tahun 2021. Adapun rekapitulasi target dan realisasi kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Paser tahun 2021 pasca ditetapkannya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Capaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 (%)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1		2	4	5						
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat	70	41.203.366.925	70	32.218.736.615	100	78,19		
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	B	64.474.570	B	37.811.797	100	58,65		
1	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan PD sesuai ketentuan	3 Dok	61.551.120	3 Dok	36.801.797	100	59,79	Subbagian Program dan Keuangan	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dok Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	1 Dok	2.923.450	1 Dok	1.010.000	100	34,55	Subbagian Program dan Keuangan	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6.569.220.000	100%	5.511.833.171	100	83,90		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kesesuaian data kepegawaian dengan Daftar Gaji ASN	100%	6.569.220.000	100%	5.511.833.171	100	83,90	Subbagian Program dan Keuangan	

III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	254.370.000	100%	238.337.350	100	93,70		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase jumlah ASN yang memiliki pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100%	-	100%	-	-	-	Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang mendapatkan pelatihan berdasarkan tugas pokok dan fungsi	8 orang	254.370.000	12 orang	238.337.350	150	93,70	Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian	
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	3.731.883.642	100%	3.262.522.943	100	87,42		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan bulanan bahan instalasi listrik dan penerangan	7 jenis	31.008.810	7 jenis	31.001.610	100	99,98	Subbagian Rumah Tangga	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan Peralatan dan perlengkapan kantor	11 unit	2.613.022.132	11 unit	2.465.632.141	100	94,36	Subbagian Rumah Tangga	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan bulanan ATK dan alat/bahan kebersihan kantor	60 buah	163.914.300	60 buah	161.757.960	100	98,68	Subbagian Rumah Tangga	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan	7 jenis	54.064.900	7 jenis	53.761.609	100	99,44	Subbagian Rumah Tangga	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media cetak berlangganan	4 jenis	184.478.800	4 jenis	136.244.500	100	73,85	Subbagian Rumah Tangga	
6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas tamu yang	3 jenis	62.708.200	3 jenis	53.090.730	100	84,66	Subbagian Rumah Tangga	

		dilayani								
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kebutuhan makan dan minum rapat pegawai	1 kali	431.067.000	1 kali	257.346.522	100	59,70	Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian	
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersusunnya arsip dinamis Sekretariat DPRD	12 dokumen	191.619.500	12 dokumen	103.687.871	100	54,11	Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian	
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik	100%	1.247.215.241	100%	1.233.256.691	100	98,88		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	0	-	0	-	-	-	Subbagian Rumah Tangga	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	15 unit	1.247.215.241	15 unit	1.233.256.691	100	98,88	Subbagian Rumah Tangga	
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan kantor	100%	1.612.280.272	100%	1.448.530.984	100	89,84		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19 Rekening	641.453.200	19 Rekening	510.784.270	100	79,63	Subbagian Rumah Tangga	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 unit	970.827.072	3 unit	937.746.714	100	96,59	Subbagian Rumah Tangga	
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin serta gedung bangunan yang terpelihara	100%	3.836.098.930	100%	3.648.169.185	100	95,10		

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	3 unit	392.247.350	3 unit	326.684.307	100	83,29	Subbagian Rumah Tangga	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	8 unit	202.833.100	8 unit	188.968.950	100	93,16	Subbagian Rumah Tangga	
3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang terpelihara	60 unit	15.000.000	60 unit	15.000.000	100	100,00	Subbagian Rumah Tangga	
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	60 unit	274.758.640	60 unit	251.320.370	100	91,47	Subbagian Rumah Tangga	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	5 Unit (4 unit Rumjab dan 1 Kantor)	2.716.690.000	5 Unit (4 unit Rumjab dan 1 Kantor)	2.658.400.372	100	97,85	Subbagian Rumah Tangga	
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	60 unit	234.569.840	60 unit	207.795.186	100	88,59	Subbagian Rumah Tangga	
IX	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	22.189.667.800	100%	15.495.647.695	100	69,83		
1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kesesuaian data keanggotaan dewan dengan Daftar Gaji Anggota DPRD	100%	21.473.003.000	100%	14.923.288.303	100	69,50	Subbagian Program dan Keuangan	

2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	150 stel	337.272.800	150 stel	316.792.795	100	93,93	Subbagian Rumah Tangga	
3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terfasilitasinya layanan pemeliharaan Kesehatan anggota DPRD	30 orang	379.392.000	30 orang	255.566.597	100	67,36	Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian	
X	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Terlaksananya layanan administrasi DPRD	100%	1.698.156.470	100%	1.342.626.799	100	79,06		
1	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Fraksi yang di Fasilitasi	6 fraksi	190.749.960	6 fraksi	163.098.960	100	85,50	Subbagian Rumah Tangga	
2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah rapat paripurna DPRD	20 kali	934.059.300	41 kali	608.499.834	205	65,15	Subbagian Persidangan	
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD	3 paket	573.347.210	3 paket	571.028.005	100	99,60	Subbagian Rumah Tangga	
B	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase perda yang ditetapkan tepat waktu	100%	23.692.128.890	100%	19.056.868.804	100	80,44		
		Dokumen KUA, PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu	6 Dok		6 Dok		100			
		Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti	100%		100%		100			
I	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang disetujui dan diundangkan	10 dok Perda	3.590.636.300	10 dok Perda	3.103.233.196		86,43		

1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Program pembentukan perda yang ditetapkan	1 dok Program Pembentukan Perda Kabupaten Paser	6.020.000	1 dok Program Pembentukan Perda Kabupaten Paser	2.150.000	100	35,71	Subbagian Kajian Perundang-undangan	
2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rancangan perda yang disetujui	5 raperda	2.626.587.700	9 raperda	2.577.683.901	180	98,14	Subbagian Kajian Perundang-undangan	
3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kajian Perundang-undangan yang dihasilkan	3 dok kajian perundang-undangan	380.457.800	4 dok kajian perundang-undangan	362.181.780	133,33	95,20	Subbagian Kajian Perundang-undangan	
4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Penjelasan/keterangan/atau naskah akademik inisiasi DPRD yang dihasilkan	3 dok Naskah Akademik	575.420.800	-	159.157.515	0	27,66	Subbagian Kajian Perundang-undangan	
5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tata tertib DPRD yang ditetapkan	1 dok Peraturan DPRD tentang Tatib	2.150.000	1 dok Peraturan DPRD tentang Tatib	2.060.000	100	95,81	Subbagian Kajian Perundang-undangan	
II	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rekomendasi hasil pembahasan kebijakan anggaran	5 rekomendasi	1.211.317.750	5 rekomendasi	805.669.320	100	66,51		
1	Pembahasan KUA dan PPAS	Tersusunnya rekomendasi hasil pembahasan Dok KUA-PPAS	1 dok rekomendasi	116.836.610	1 dok rekomendasi	107.396.771	100	91,92	Subbagian Fasilitasi Penganggaran	
2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya rekomendasi hasil pembahasan Dok KUPA-PPASP	1 dok rekomendasi	336.518.540	1 dok rekomendasi	203.369.895	100	60,43	Subbagian Fasilitasi Penganggaran	
3	Pembahasan APBD	Tersusunnya rekomendasi hasil pembahasan Dok APBD	1 dok rekomendasi	576.360.000	1 dok rekomendasi	378.433.510	100	65,66	Subbagian Fasilitasi Penganggaran	

4	Pembahasan APBD Perubahan	Tersusunnya rekomendasi hasil pembahasan Dok APBD perubahan	1 dok rekomendasi	62.634.000	1 dok rekomendasi	1.010.000	100	1,61	Subbagian Fasilitasi Penganggaran	
5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Tersusunnya rekomendasi hasil pembahasan Dok Pertanggung jawaban APBD	1 dok rekomendasi	118.968.600	1 dok rekomendasi	115.459.144	100	97,05	Subbagian Fasilitasi Penganggaran	
III	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rekomendasi Pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang ditindaklanjuti	62 rekomendasi	8.743.318.370	62 rekomendasi	7.358.656.154		84,16		
1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Rekomendasi pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintahan dan hukum	3 dok rekomendasi	1.727.644.600	3 dok rekomendasi	1.316.484.534	100	76,20	Subbagian Fasilitasi Pengawasan	
2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Rekomendasi Pengawasan urusan pemerintah bidang infrastruktur	3 dok rekomendasi	1.682.770.660	3 dok rekomendasi	1.657.213.120	100	98,48	Subbagian Fasilitasi Pengawasan	
3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi Pengawasan urusan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat	3 dok rekomendasi	1.310.203.000	3 dok rekomendasi	1.208.090.059	100	92,21	Subbagian Fasilitasi Pengawasan	
4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Rekomendasi Pengawasan urusan pemerintah bidang Perekonomian	3 dok rekomendasi	1.235.268.870	3 dok rekomendasi	1.130.796.767	100	91,54	Subbagian Fasilitasi Pengawasan	
5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Rekomendasi Pengawasan urusan pemerintah bidang Sumber Daya Alam	3 dok rekomendasi	1.088.266.000	3 dok rekomendasi	916.037.011	100	84,17	Subbagian Fasilitasi Pengawasan	
6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terkoordinasikannya Pengawasan Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 dok rekomendasi	30.862.680	1 dok rekomendasi	28.142.800	100	91,19	Subbagian Fasilitasi Penganggaran	

7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Rekomendasi pengawasan penggunaan anggaran	3 dok rekomendasi	1.507.408.000	3 dok rekomendasi	949.940.116	100	63,02	Subbagian Fasilitasi Pengawasan	
8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Rekomendasi hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	1 dok rekomendasi	160.894.560	1 dok rekomendasi	151.951.747	100	94,44	Subbagian Fasilitasi Penganggaran	
IV	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terwujudnya fasilitasi dukungan terhadap peningkatan kapasitas DPRD yang optimal	100%	4.418.607.550	100%	3.116.223.647	100	70,53		
1	Bimbingan Teknis DPRD	Terfasilitasinya bimbingan teknis Pimpinan dan Anggota DPRD	1 kali	1.379.997.000	1 kali	738.379.831	100	53,51	Subbagian TU dan Kepegawaian	
2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya penyampaian informasi kegiatan DPRD	12 kegiatan	618.535.230	12 kegiatan	485.301.173	100	78,46	Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi	
3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersusunnya draft hasil analisa tim ahli/kelompok pakar sebagai bahan pembahasan rapat AKD	80%	332.771.000	70%	200.086.713	87,50	60,13	Subbagian TU dan Kepegawaian	
4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya tenaga ahli fraksi	6 orang	278.410.000	6 orang	262.410.000	100	94,25	Subbagian TU dan Kepegawaian	
5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Tersusunnya laporan aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	4 kegiatan	1.799.773.910	2 kegiatan	1.429.035.930	50	79,40	Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi	
6	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya Program Kerja Tahunan DPRD	1 Dok	9.120.410	1 Dok	1.010.000	100	11,07	Subbagian Persidangan	
V	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dok laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan bagi penyusunan	95 Dok	1.983.731.320	95 Dok	1.644.770.024		82,91		

		perencanaan pembangunan daerah								
1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Tersusunnya laporan kunjungan kerja dalam daerah	1 rekomendasi	5.986.460	1 rekomendasi	1.535.000	100	25,64	Subbagian Kerjasama dan Aspirasi	
2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya Dok pokok-pokok pikiran DPRD	1 Dok	114.989.860	1 Dok	92.703.924	100	80,62	Subbagian Kerjasama dan Aspirasi	
3	Pelaksanaan Reses	Tersusunnya bahan masukan dalam penyusunan Dok perencanaan pembangunan daerah	2 Dok	1.862.755.000	3 Dok	1.550.531.100	150	83,24	Subbagian Kerjasama dan Aspirasi	
VI	Fasilitasi Tugas DPRD	Dok laporan fasilitasi tugas DPRD	35 Dok	3.744.517.600	35 Dok	3.028.316.463		80,87		
1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Tersusunnya laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 dok laporan	1.116.805.000	1 dok laporan	1.066.188.873	100	95,47	Subbagian Kerjasama dan Aspirasi	
2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya laporan kinerja DPRD	1 Dok	-	1 Dok	-	-	-	Subbagian Persidangan	
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Tersusunnya jadwal kegiatan DPRD	12 Dok	1.537.954.400	12 Dok	874.505.778	100	56,86	Subbagian Persidangan	
4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya fasilitasi tugas pimpinan	1 Dok	1.089.758.200	1 Dok	1.087.621.812	100	99,80	Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi	
			JUMLAH	64.895.495.815		51.275.605.419		79,01		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus dilaksanakan secara terkoordinasi lintas Bagian dan lintas sub bagian secara terpadu, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dengan senantiasa memperhatikan hierarki struktural yang berlaku di dalam lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun Rincian Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- b. Fungsi :
 - 1) Penyusunan perencanaan program sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - 2) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - 3) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - 4) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - 5) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur Pelayanan dan fasilitasi kedewanan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan fasilitasi DPRD di masa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasi kedewanan sangat bergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (*bottom-up*) maupun dari tingkat atas (*top-down*), sehingga peran serta masyarakat (*stakeholders*) sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser tahun 2021, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 2.3
Pencapaian Pelayanan Kinerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Paser

NO	Indikator	IKK	Target Renstra Sekretariat DPRD						Realisasi						Catatan
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
1.	Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD		85%	85%	85%	85%	87%	90%	NA	NA	NA	83,33%	86,67%	109,89%	
2.	Persentase fasilitasi pembahasan peraturan daerah		80%	80%	80%	85%	87%	90%	NA	NA	NA	100%	100%	104,82%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Berdasarkan kepada tugas pokok, fungsi, dan organisasi yang ada pada kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Paser adalah:

- a. Menyelenggarakan pelayanan umum yang handal, efektif, efisien dan akuntabel guna menunjang pelaksanaantugas-tugas DPRD .
- b. Menyelenggarakan pelayanan penyediaan sarana dan prasarana serta perlengkapan kantor dan gedung DPRD.
- c. Menyelenggarakan/memberikan pelayanan penyediaan tenaga asistensi, aplikasi dan tenaga ahli.
- d. Menyelenggarakan pelayanan penyediaan anggaran dan keuangan.
- e. Menjaga, mengamankan dan mensosialisasikan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD.

Tugas yang dilaksanakan oleh Sekretariat melayani segala kegiatan Anggota maupun pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik itu sifatnya pemberian informasi berkenaan dengan aturan, pelayanan kegiatan rapat-rapat, pelayanan pendampingan kegiatan kunjungan kerja maupun peningkatan sumber daya manusia, serta pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana yang kesemuanya itu bertujuan menunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

Fungsi pertama sebagaimana point kesatu diwujudkan dalam membentuk dan penetapan Peraturan daerah bersama sama dengan kepala daerah beserta jajarannya, fungsi kedua yaitu fungsi anggaran merupakan keterpaduan antara pihak eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan suatu kesepakatan bersama di dalam penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sedangkan fungsi ketiga diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan produk peraturan perundang undangan, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang kesemuanya dijalankan semata-mata sebagai fungsi kontrol pihak legislatif terhadap eksekutif dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, di dalam menjalankan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah, yang selanjutnya diimplementasikan oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah baik dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten, dengan kata lain DPRD merupakan partner pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan di segala bidang.

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan perlu dilengkapi dengan analisis dan identifikasi isu-isu strategis guna meningkatkan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis yang diuraikan dalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser ini merupakan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi

Sekretariat DPRD yang pada dasarnya terdiri dari potensi, peluang dan tantangan sebagai suatu kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang akan disusun karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat DPRD di masa yang akan datang. Isu-isu strategis yang dapat diidentifikasi dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Paser yaitu sebagai berikut:

- a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal
- b. Belum optimalnya pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- c. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD
- d. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.
- e. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD
- f. Masih belum tersedianya fasilitas informasi yang mudah diakses masyarakat dalam setiap aktivitas kinerja DPRD baik sebagai individu maupun lembaga.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2023, memang beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu disebabkan karena adanya beberapa perubahan mengenai Peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser tahun 2023 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Paser

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun N	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun N	Pagu Indikatif (Rp)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat	72	33.423.190.548	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat	72	33.423.190.548
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	B	110.669.870	I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	B	110.669.870
1	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	61.550.600	1	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	61.550.600
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dok	2.799.680	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dok	2.799.680
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	46.319.590	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	46.319.590
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6.371.007.641	II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6.371.007.641
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang/bulan	6.316.204.461	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang/bulan	6.316.204.461
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dok	24.844.420	2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dok	24.844.420
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dok	29.958.760	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dok	29.958.760
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	104.844.000	III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	104.844.000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	105 Paket	-	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	105 Paket	-

2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	104.844.000	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	104.844.000
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	921.415.087	IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	921.415.087
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	31.000.640	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	31.000.640
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	338.019.510	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	338.019.510
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	105.720.285	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	105.720.285
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	36.003.000	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	36.003.000
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	56.300.000	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	56.300.000
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	32.485.000	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	32.485.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 laporan	236.804.000	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 laporan	236.804.000
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 dokumen	35.082.652	8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 dokumen	35.082.652
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik	100%	233.560.411	V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik	100%	233.560.411
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	-	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	-
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	34 unit	233.560.411	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	34 unit	233.560.411
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan kantor	100%	1.508.361.832	VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan kantor	100%	1.508.361.832
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	588.113.200	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	588.113.200

2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	920.248.632	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	920.248.632
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin serta gedung bangunan yang terpelihara	100%	1.314.536.802	VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin serta gedung bangunan yang terpelihara	100%	1.314.536.802
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	358.399.204	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	358.399.204
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	154.489.899	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	154.489.899
3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 unit	14.640.000	3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 unit	14.640.000
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 unit	167.103.840	4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 unit	167.103.840
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	527.671.859	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	527.671.859
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	256 Unit	92.232.000	6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	256 Unit	92.232.000
VIII	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	21.814.602.151	VIII	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	21.814.602.151
1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 orang/bulan	21.107.582.151	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 orang/bulan	21.107.582.151
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	30 paket	326.070.000	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	30 paket	326.070.000
3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	30 orang	380.950.000	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	30 orang	380.950.000
IX	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Terlaksananya layanan administrasi DPRD	100%	1.044.192.754	IX	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Terlaksananya layanan administrasi DPRD	100%	1.044.192.754
1	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	2 laporan	53.352.074	1	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	2 laporan	53.352.074
2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	20 laporan	417.667.000	2	Fasilitasi Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	20 laporan	417.667.000

	Konsultasi DPRD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				dan Konsultasi DPRD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	40 paket	573.173.680	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	40 paket	573.173.680
B	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase perda yang ditetapkan tepat waktu	100%	15.850.389.504	B	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase perda yang ditetapkan tepat waktu	100%	15.850.389.504
		Dokumen KUA, PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu	6 Dok				Dokumen KUA, PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu	6 Dok	
		Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti	100%				Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti	100%	
I	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang disetujui dan diundangkan	10 dok Perda	2.577.162.451	I	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang disetujui dan diundangkan	10 dok Perda	2.577.162.451
1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	9.259.300	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	9.259.300
2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 dokumen	1.762.658.451	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 dokumen	1.762.658.451
3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 dokumen	335.399.650	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 dokumen	335.399.650
4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 dokumen	460.585.600	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 dokumen	460.585.600
5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	9.259.450	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	9.259.450
II	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rekomendasi hasil pembahasan kebijakan anggaran	5 rekomendasi	573.757.000	II	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rekomendasi hasil pembahasan kebijakan anggaran	5 rekomendasi	573.757.000
1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	84.595.000	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	84.595.000
2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	31.140.500	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	31.140.500
3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	147.235.000	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	147.235.000

4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	30.450.500	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	30.450.500
5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	280.336.000	5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	280.336.000
III	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rekomendasi Pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang ditindaklanjuti	62 rekomendasi	5.646.235.000	III	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rekomendasi Pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang ditindaklanjuti	62 rekomendasi	5.646.235.000
1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3 laporan	867.220.000	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3 laporan	867.220.000
2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 laporan	867.220.000	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 laporan	867.220.000
3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 laporan	867.220.000	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 laporan	867.220.000
4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 laporan	867.220.000	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 laporan	867.220.000
5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 laporan	867.220.000	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 laporan	867.220.000
6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 dokumen	30.861.000	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 dokumen	30.861.000
7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	3 dokumen	867.220.000	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	3 dokumen	867.220.000
8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dokumen	412.054.000	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dokumen	412.054.000
IV	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terwujudnya fasilitasi dukungan terhadap peningkatan kapasitas DPRD yang optimal	100%	3.195.339.600	IV	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terwujudnya fasilitasi dukungan terhadap peningkatan kapasitas DPRD yang optimal	100%	3.195.339.600
1	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 dokumen	-	1	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 dokumen	-
2	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 dokumen	1.305.822.000	2	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 dokumen	1.305.822.000
3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan	24 dokumen	298.995.000	3	Publikasi dan Dokumentasi	Jumlah Dokumen Penyebarluasan	24 dokumen	298.995.000

		Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				Dewan	Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan		
4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 orang	264.172.000	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 orang	264.172.000
5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 orang	274.732.000	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 orang	274.732.000
6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dok	1.042.498.600	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dok	1.042.498.600
7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dok	9.120.000	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dok	9.120.000
V	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dok laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah	95 Dok	1.762.251.800	V	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dok laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah	95 Dok	1.762.251.800
1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 laporan	69.370.000	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 laporan	69.370.000
2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dok	84.987.000	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dok	84.987.000
3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	1.607.894.800	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	1.607.894.800
VI	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Dok kode etik DPRD dan laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	2 Dok	139.932.453	VI	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Dok kode etik DPRD dan laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	2 Dok	139.932.453
1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dok	-	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dok	-
2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 laporan	139.932.453	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 laporan	139.932.453
VII	Fasilitasi Tugas DPRD	Dok laporan fasilitasi tugas DPRD	35 Dok	1.955.711.200	VII	Fasilitasi Tugas DPRD	Dok laporan fasilitasi tugas DPRD	35 Dok	1.955.711.200
1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10 dokumen	472.732.000	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10 dokumen	472.732.000
2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	25.000.000	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	25.000.000
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dok	753.455.000	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dok	753.455.000
4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dok	704.524.200	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dok	704.524.200
			JUMLAH	49.273.580.052					49.273.580.052

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses *bottom-up* dan *top down*. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan *bottom up* dengan perencanaan yang bersifat *top down* sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum SKPD serta Musrenbang Tingkat Kabupaten. Pada tahap Forum SKPD, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD terkait.

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun renja SKPD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum SKPD dan juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Paser Tahun 2023, maka ditetapkan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser tahun 2023.

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Sekretariat DPRD Kabupaten Paser
Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Besaran/Volume
1		2	3	4	5
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat		72	33.423.190.548
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten		B	110.669.870
1	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dok	61.550.600
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Dok	2.799.680
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dok	46.319.590
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	6.371.007.641
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		45 orang/bulan	6.316.204.461
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 Dok	24.844.420
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 Dok	29.958.760
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	104.844.000

1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		105 Paket	-
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		20 orang	104.844.000
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100%	921.415.087
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket	31.000.640
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		10 paket	338.019.510
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		7 paket	105.720.285
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 paket	36.003.000
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		4 dokumen	56.300.000
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 laporan	32.485.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		45 laporan	236.804.000
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		8 dokumen	35.082.652
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik		100%	233.560.411
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0	-
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		34 unit	233.560.411

VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan kantor		100%	1.508.361.832
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	588.113.200
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2 laporan	920.248.632
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin serta gedung bangunan yang terpelihara		100%	1.314.536.802
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		4 unit	358.399.204
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		3 unit	154.489.899
3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		50 unit	14.640.000
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		105 unit	167.103.840
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		7 unit	527.671.859
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		256 Unit	92.232.000
VIII	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD		100%	21.814.602.151
1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		30 orang/bulan	21.107.582.151
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		30 paket	326.070.000

3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD		30 orang	380.950.000
IX	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Terlaksananya layanan administrasi DPRD		100%	1.044.192.754
1	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD		2 laporan	53.352.074
2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		20 laporan	417.667.000
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan		40 paket	573.173.680
B	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase perda yang ditetapkan tepat waktu		100%	15.850.389.504
		Dokumen KUA, PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu		6 Dok	
		Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti		100%	
I	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang disetujui dan diundangkan		10 dok Perda	2.577.162.451
1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		1 dokumen	9.259.300
2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		10 dokumen	1.762.658.451
3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan		3 dokumen	335.399.650
4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		3 dokumen	460.585.600
5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		1 dokumen	9.259.450
II	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rekomendasi hasil pembahasan kebijakan anggaran		5 rekomendasi	573.757.000

1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		1 dokumen	84.595.000
2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		1 dokumen	31.140.500
3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		1 dokumen	147.235.000
4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		1 dokumen	30.450.500
5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		1 dokumen	280.336.000
III	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rekomendasi Pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang ditindaklanjuti		62 rekomendasi	5.646.235.000
1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		3 laporan	867.220.000
2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		3 laporan	867.220.000
3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		3 laporan	867.220.000
4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		3 laporan	867.220.000
5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		3 laporan	867.220.000
6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		1 dokumen	30.861.000
7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		3 dokumen	867.220.000
8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		1 dokumen	412.054.000
IV	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terwujudnya fasilitasi dukungan terhadap		100%	3.195.339.600

		peningkatan kapasitas DPRD yang optimal			
1	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD		1 dokumen	-
2	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		3 dokumen	1.305.822.000
3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan		24 dokumen	298.995.000
4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		3 orang	264.172.000
5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		6 orang	274.732.000
6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		12 Dok	1.042.498.600
7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		1 Dok	9.120.000
V	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dok laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah		95 Dok	1.762.251.800
1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		1 laporan	69.370.000
2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		1 Dok	84.987.000
3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		3 dokumen	1.607.894.800
VI	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Dok kode etik DPRD dan laporan hasil pengawasan kode etik DPRD		2 Dok	139.932.453
1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		1 Dok	-
2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		3 laporan	139.932.453
VII	Fasilitasi Tugas DPRD	Dok laporan fasilitasi tugas DPRD		35 Dok	1.955.711.200

1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		10 dokumen	472.732.000
2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		1 laporan	25.000.000
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		12 Dok	753.455.000
4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		12 Dok	704.524.200
					49.273.580.052

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkelanjutan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok, yakni:

- (1) merosotnya kewibawaan negara;
- (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional;
- (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Tantangan utama pembangunan dapat dikelompokkan:

- (1) dalam rangka meningkatkan wibawa negara, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tatakelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi;
- (2) dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan;
- (3) dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kesenjangan antar wilayah, dan percepatan pembangunan kelautan.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2021-2026. Pernyataan Visi Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut:

"MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA"

Yang dimaksud dengan MENUJU KABUPATEN PASER MAJU adalah bahwa:

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui peningkatan profesionalitas aparatur.
- b. Masyarakat Kabupaten Paser dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri, berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki.
- c. Pemerintah Kabupaten Paser bertekad menjalankan reformasi birokrasi.

Yang dimaksud dengan MENUJU KABUPATEN PASER ADIL adalah bahwa:

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan yakni setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama dalam mendapat penghidupan yang lebih baik dari sebelumnya.
- b. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian alam.

Yang dimaksud dengan MENUJU KABUPATEN PASER SEJAHTERA adalah bahwa:

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akses kebutuhan dasar masyarakat.
- b. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dalam periode 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026), maka Misi yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.

Arah dari Misi 1 ini meliputi Pembangunan Pertanian dalam arti luas, ketersediaan pangan bagi masyarakat, pembangunan industri pengolahan, peningkatan investasi, ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, pengembangan pariwisata dan kebudayaan, serta peningkatan usaha perdagangan, koperasi dan UMKM

2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan.

Arah dari Misi 2 ini meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan profesionalisme ASN, peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah, peningkatan lingkungan daerah yang kondusif, penerapan Peraturan daerah dan pencegahan terjadinya konflik social.

3. Mengurangi Ketimpangan Antar wilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.

Arah dari Misi 3 ini meliputi pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan pengairan, peningkatan aksesibilitas antar wilayah, peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman masyarakat, Sistem Penyediaan Air Minum, peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan bencana.

4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

Arah dari Misi 4 ini meliputi pengembangan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, jaminan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya.

Dengan memperhatikan penjabaran misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser di atas, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Paser memiliki keterkaitan tugas dan fungsi pada misi kedua. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tupoksi Sekretariat DPRD yaitu penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan RPJMD di atas, maka indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan aktualisasi penyelenggaraan/ pelaksanaan program prioritas yang diamanatkan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Paser melalui kegiatan pokok yang relevan dengan tugas dan fungsi dalam kerangka menggapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Dari uraian di atas dalam mendukung tercapainya kebijakan tersebut kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD sebagai berikut:

- A. Tugas utama: Meningkatnya Fasilitasi terhadap DPRD dalam melaksanakan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Pengawasan dan Anggaran, melalui PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD, dengan kegiatan:

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 4. Peningkatan Kapasitas DPRD
 5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 7. Fasilitasi Tugas DPRD
- B. Tugas pendukung: Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD, melalui PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, dengan kegiatan:
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 9. Layanan Administrasi DPRD

Dalam menunjang meningkatnya kinerja DPRD sangat dibutuhkan faktor pendukung sarana dan prasarana yang memadai serta Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang trampil, akuntabel dan profesional sehingga tugas dan fungsi fasilitasi terhadap pelaksanaan 3 fungsi Anggota DPRD yaitu fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan dapat dilaksanakan secara optimal.

Tabel 3.1
Indikator Tujuan dan Formula
Perhitungan

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN
1	Meningkatnya kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD	Persentase Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	$\frac{\sum \text{Anggota DPRD yang Puas terhadap pelayanan Sekretariat}}{\sum \text{Jumlah Anggota DPRD}} \times 100\%$
2	Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah	Persentase fasilitasi pembahasan peraturan daerah	$\frac{\sum \text{Raperda yang Dibahas}}{\sum \text{Raperda yang diajukan}} \times 100\%$

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Bertolak dari visi dan misi yang telah ditetapkan maka yang menjadi tujuan strateginya adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas DPRD

Penjabaran dari upaya pencapaian tujuan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Paser harus menetapkan sasaran yang hendak di capai dalam kurun waktu tertentu, baik satu tahun, dua tahun, hingga lima tahun ke depan.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kab. Paser tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel.
2. Meningkatkan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Tabel 3.2
Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Rencana Kerja Sekretariat DPRD
Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Besaran/ Volume
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK-RI dan APIP eksternal	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat	72	33.423.190.548
		Nilai evaluasi SAKIP dari APIP	A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	B	110.669.870
				Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	61.550.600
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dok	2.799.680
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	46.319.590
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan	100%	6.371.007.641

					Perangkat Daerah		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang/bulan	6.316.204.461
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dok	24.844.420
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dok	29.958.760
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	104.844.000
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	105 Paket	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	104.844.000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	921.415.087
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	31.000.640
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	338.019.510

				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	105.720.285
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	36.003.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	56.300.000
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	32.485.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 laporan	236.804.000
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 dokumen	35.082.652
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik	100%	233.560.411
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	-
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	34 unit	233.560.411
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan kantor	100%	1.508.361.832

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	588.113.200
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	920.248.632
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin serta gedung bangunan yang terpelihara	100%	1.314.536.802
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	358.399.204
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	154.489.899
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 unit	14.640.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 unit	167.103.840
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	527.671.859
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	256 Unit	92.232.000

				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	21.814.602.151
				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 orang/bulan	21.107.582.151
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	30 paket	326.070.000
				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	30 orang	380.950.000
				Layanan Administrasi DPRD	Persentase Terlaksananya layanan administrasi DPRD	100%	1.044.192.754
				Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	2 laporan	53.352.074
				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20 laporan	417.667.000
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	40 paket	573.173.680
	Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase perda yang ditetapkan tepat waktu	100%	15.850.389.504
					Dokumen KUA, PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu	6 Dok	
					Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti	100%	

				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang disetujui dan diundangkan	10 dok Perda	2.577.162.451
				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	9.259.300
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 dokumen	1.762.658.451
				Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 dokumen	335.399.650
				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 dokumen	460.585.600
				Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	9.259.450
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rekomendasi hasil pembahasan kebijakan anggaran	5 rekomendasi	573.757.000
				Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	84.595.000
				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	31.140.500
				Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	147.235.000

				Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	30.450.500
				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	280.336.000
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rekomendasi Pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang ditindaklanjuti	62 rekomendasi	5.646.235.000
				Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3 laporan	867.220.000
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 laporan	867.220.000
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 laporan	867.220.000
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 laporan	867.220.000
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 laporan	867.220.000
				Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan	1 dokumen	30.861.000

					Pemeriksa Keuangan		
				Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	3 dokumen	867.220.000
				Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dokumen	412.054.000
				Peningkatan Kapasitas DPRD	Terwujudnya fasilitasi dukungan terhadap peningkatan kapasitas DPRD yang optimal	100%	3.195.339.600
				Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 dokumen	-
				Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 dokumen	1.305.822.000
				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	24 dokumen	298.995.000
				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 orang	264.172.000
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 orang	274.732.000
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dok	1.042.498.600
				Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dok	9.120.000

				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dok laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah	95 Dok	1.762.251.800
				Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 laporan	69.370.000
				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dok	84.987.000
				Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	1.607.894.800
				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Dok kode etik DPRD dan laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	2 Dok	139.932.453
				Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dok	-
				Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 laporan	139.932.453
				Fasilitasi Tugas DPRD	Dok laporan fasilitasi tugas DPRD	35 Dok	1.955.711.200
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10 dokumen	472.732.000
				Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	25.000.000
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dok	753.455.000

				Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dok	704.524.200
							49.273.580.052

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor Rumusan Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

b. Rekapitulasi program dan kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD tahun 2023 merupakan upaya-upaya dalam mencapai visi dan misi Pembangunan Kabupaten Paser yang ingin diwujudkan pada 2021-2026 yaitu **Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera**.

Sejalan dengan Program prioritas pembangunan tahun 2023 (RKPD) maka Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Paser ada 2 program, 16 kegiatan, dan 62 sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2023 dan Kondisi Akhir

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Kondisi Akhir	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan								
4.02	Sekretariat DPRD								
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat		72	33.423.190.548			80	189.863.894.051
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	Sekretariat DPRD	B	110.669.870	APBD		25 Dok	615.967.369
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	2 Dok	61.550.600	APBD		10 Dok	340.108.792
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat DPRD	2 Dok	2.799.680	APBD		10 Dok	16.153.908
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	1 Dok	46.319.590	APBD		5 Dok	259.704.669
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	100%	6.371.007.641	APBD		100%	33.638.815.678

4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	45 orang/bulan	6.316.204.461	APBD		225 orang/60 bulan	33.334.905.959
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sekretariat DPRD	12 Dok	24.844.420	APBD		60 Dok	138.140.781
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sekretariat DPRD	2 Dok	29.958.760	APBD		10 Dok	165.768.938
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	100%	104.844.000	APBD		100%	1.355.868.345
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sekretariat DPRD	105 Paket	-	APBD		525 Paket	-
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Luar kabupaten dan luar provinsi	20 orang	104.844.000	APBD		100 orang	1.355.868.345
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Sekretariat DPRD	100%	921.415.087	APBD		100%	5.943.519.982
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sekretariat DPRD	1 paket	31.000.640	APBD		5 paket	171.343.251
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sekretariat DPRD	10 paket	338.019.510	APBD		50 paket	2.034.401.823
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sekretariat DPRD	7 paket	105.720.285	APBD		35 paket	584.372.693
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sekretariat DPRD	1 paket	36.003.000	APBD		5 paket	198.967.483

4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sekretariat DPRD	4 dokumen	56.300.000	APBD		20 dokumen	317.192.232
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sekretariat DPRD	1 laporan	32.485.000	APBD		5 laporan	179.590.752
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat DPRD	45 laporan	236.804.000	APBD		225 laporan	1.869.481.296
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sekretariat DPRD	8 dokumen	35.082.652	APBD		40 Dok	588.170.460
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik	Sekretariat DPRD	100%	233.560.411	APBD		100%	2.773.780.908
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Sekretariat DPRD	0	-	APBD		3 unit	-
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sekretariat DPRD	34 unit	233.560.411	APBD		170 unit	2.773.780.908
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan kantor	Sekretariat DPRD	100%	1.508.361.832	APBD		100%	8.349.175.066
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sekretariat DPRD	12 laporan	588.113.200	APBD		60 laporan	3.261.024.220
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sekretariat DPRD	2 laporan	920.248.632	APBD		10 laporan	5.088.150.845
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin serta gedung bangunan yang terpelihara	Sekretariat DPRD	100%	1.314.536.802	APBD		100%	6.819.456.096

4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sekretariat DPRD	4 unit	358.399.204	APBD		20 unit	2.081.214.369
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sekretariat DPRD	3 unit	154.489.899	APBD		15 unit	1.036.828.454
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Sekretariat DPRD	50 unit	14.640.000	APBD		250 unit	82.884.469
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sekretariat DPRD	105 unit	167.103.840	APBD		525 unit	925.453.276
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sekretariat DPRD	7 unit	527.671.859	APBD		35 unit	2.044.907.931
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Sekretariat DPRD	256 Unit	92.232.000	APBD		1280 Unit	648.167.597
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Sekretariat DPRD	100%	21.814.602.151	APBD		100%	123.150.218.321
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Sekretariat DPRD	30 orang/bulan	21.107.582.151	APBD		150 orang/60bulan	119.324.045.245
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Sekretariat DPRD	30 paket	326.070.000	APBD		150 paket	1.824.337.993
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	Luar kabupaten	30 orang	380.950.000	APBD		150 orang	2.001.835.083

4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Terlaksananya layanan administrasi DPRD	Sekretariat DPRD	100%	1.044.192.754	APBD		100%	7.217.092.289
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Sekretariat DPRD	2 laporan	53.352.074	APBD		10 laporan	295.096.945
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD	20 laporan	417.667.000	APBD		100 laporan	3.753.890.083
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Sekretariat DPRD	40 paket	573.173.680	APBD		200 paket	3.168.105.262
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase perda yang ditetapkan tepat waktu	Sekretariat DPRD	100%	15.850.389.504	APBD		100%	107.736.887.853
		Dokumen KUA, PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu	Sekretariat DPRD	6 Dok				6 Dok	
		Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti	Sekretariat DPRD	100%				100%	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang disetujui dan diundangkan	Sekretariat DPRD	10 dok Perda	2.577.162.451	APBD		50 dok Perda	15.820.265.141
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	1 dokumen	9.259.300	APBD		5 dokumen	51.164.418
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	10 dokumen	1.762.658.451	APBD		50 dokumen	11.319.612.849
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	3 dokumen	335.399.650	APBD		15 dokumen	1.853.295.672

4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Sekretariat DPRD	3 dokumen	460.585.600	APBD		15 dokumen	2.545.027.179
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Sekretariat DPRD	1 dokumen	9.259.450	APBD		5 dokumen	51.165.024
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rekomendasi hasil pembahasan kebijakan anggaran	Sekretariat DPRD	5 rekomendasi	573.757.000	APBD		25 rekomendasi	3.722.997.384
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD	1 dokumen	84.595.000	APBD		5 dokumen	467.446.302
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekretariat DPRD	1 dokumen	31.140.500	APBD		5 dokumen	172.074.788
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD	1 dokumen	147.235.000	APBD		5 dokumen	813.599.472
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD	1 dokumen	30.450.500	APBD		5 dokumen	168.263.761
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sekretariat DPRD	1 dokumen	280.336.000	APBD		5 dokumen	2.101.613.065
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rekomendasi Pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang ditindaklanjuti	Sekretariat DPRD	62 rekomendasi	5.646.235.000	APBD		310 rekomendasi	44.780.552.894
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Sekretariat DPRD	3 laporan	867.220.000	APBD		15 laporan	8.910.880.502
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Sekretariat DPRD	3 laporan	867.220.000	APBD		15 laporan	8.146.685.700

4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat DPRD	3 laporan	867.220.000	APBD		15 laporan	6.991.164.035
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Sekretariat DPRD	3 laporan	867.220.000	APBD		15 laporan	5.764.834.169
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Sekretariat DPRD	3 laporan	867.220.000	APBD		15 laporan	5.764.766.204
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Sekretariat DPRD	1 dokumen	30.861.000	APBD		5 dokumen	170.532.142
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Sekretariat DPRD	3 dokumen	867.220.000	APBD		15 dokumen	6.754.571.977
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Sekretariat DPRD	1 dokumen	412.054.000	APBD		5 dokumen	2.277.118.164
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terwujudnya fasilitasi dukungan terhadap peningkatan kapasitas DPRD yang optimal	Sekretariat DPRD	100%	3.195.339.600	APBD		100%	19.537.163.940
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Luar kabupaten dan luar provinsi	1 dokumen	-	APBD		5 dokumen	-
4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Luar kabupaten dan luar provinsi	3 dokumen	1.305.822.000	APBD		15 dokumen	7.625.819.806
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sekretariat DPRD	24 dokumen	298.995.000	APBD		120 dokumen	2.706.855.293

4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sekretariat DPRD	3 orang	264.172.000	APBD		15 orang	1.736.125.711
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Sekretariat DPRD	6 orang	274.732.000	APBD		30 orang	1.518.211.391
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sekretariat DPRD	12 Dok	1.042.498.600	APBD		60 Dok	5.895.803.122
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Sekretariat DPRD	1 Dok	9.120.000	APBD		5 Dok	54.348.618
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dok laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Sekretariat DPRD	95 Dok	1.762.251.800	APBD		475 Dok	9.737.565.331
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Dalam kabupaten	1 laporan	69.370.000	APBD		5 laporan	383.316.134
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Sekretariat DPRD	1 Dok	84.987.000	APBD		5 Dok	469.608.812
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dalam kabupaten	3 dokumen	1.607.894.800	APBD		3 dokumen	8.884.640.384
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Dok kode etik DPRD dan laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	Sekretariat DPRD	2 Dok	139.932.453	APBD		10 Dok	773.483.388
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Sekretariat DPRD	1 Dok	-	APBD		5 Dok	-
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRD	3 laporan	139.932.453	APBD		15 laporan	773.483.388
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Dok laporan fasilitasi tugas DPRD	Sekretariat DPRD	35 Dok	1.955.711.200	APBD		175 Dok	13.364.859.776

4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Luar kabupaten dan luar provinsi	10 dokumen	472.732.000	APBD		50 dokumen	3.058.315.333
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Sekretariat DPRD	1 laporan	25.000.000	APBD		5 laporan	138.140.781
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sekretariat DPRD	12 Dok	753.455.000	APBD		60 Dok	5.575.187.321
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD	12 Dok	704.524.200	APBD		60 Dok	4.593.216.341
TOTAL ANGGARAN									49.273.580.052
									297.600.781.905

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum SKPD dan juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Paser Tahun 2023, maka ditetapkan Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Tahun 2023

Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat		72	33.423.190.548	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	Sekretariat DPRD	B	110.669.870	APBD
Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	2 Dok	61.550.600	APBD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat DPRD	2 Dok	2.799.680	APBD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	1 Dok	46.319.590	APBD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	100%	6.371.007.641	APBD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	45 orang/bulan	6.316.204.461	APBD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sekretariat DPRD	12 Dok	24.844.420	APBD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Sekretariat DPRD	2 Dok	29.958.760	APBD

	SKPD				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	100%	104.844.000	APBD
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sekretariat DPRD	105 Paket	-	APBD
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Luar kabupaten dan luar provinsi	20 orang	104.844.000	APBD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Sekretariat DPRD	100%	921.415.087	APBD
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sekretariat DPRD	1 paket	31.000.640	APBD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sekretariat DPRD	10 paket	338.019.510	APBD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sekretariat DPRD	7 paket	105.720.285	APBD
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sekretariat DPRD	1 paket	36.003.000	APBD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sekretariat DPRD	4 dokumen	56.300.000	APBD
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sekretariat DPRD	1 laporan	32.485.000	APBD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat DPRD	45 laporan	236.804.000	APBD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sekretariat DPRD	8 dokumen	35.082.652	APBD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik	Sekretariat DPRD	100%	233.560.411	APBD
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Sekretariat DPRD	0	-	APBD
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sekretariat DPRD	34 unit	233.560.411	APBD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan kantor	Sekretariat DPRD	100%	1.508.361.832	APBD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sekretariat DPRD	12 laporan	588.113.200	APBD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sekretariat DPRD	2 laporan	920.248.632	APBD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin serta gedung	Sekretariat DPRD	100%	1.314.536.802	APBD

Pemerintahan Daerah	bangunan yang terpelihara				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sekretariat DPRD	4 unit	358.399.204	APBD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sekretariat DPRD	3 unit	154.489.899	APBD
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Sekretariat DPRD	50 unit	14.640.000	APBD
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sekretariat DPRD	105 unit	167.103.840	APBD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sekretariat DPRD	7 unit	527.671.859	APBD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Sekretariat DPRD	256 Unit	92.232.000	APBD
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Sekretariat DPRD	100%	21.814.602.151	APBD
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Sekretariat DPRD	30 orang/bulan	21.107.582.151	APBD
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Sekretariat DPRD	30 paket	326.070.000	APBD
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	Luar kabupaten	30 orang	380.950.000	APBD
Layanan Administrasi DPRD	Persentase Terlaksananya layanan administrasi DPRD	Sekretariat DPRD	100%	1.044.192.754	APBD
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Sekretariat DPRD	2 laporan	53.352.074	APBD
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD	20 laporan	417.667.000	APBD
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Sekretariat DPRD	40 paket	573.173.680	APBD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase perda yang ditetapkan tepat waktu	Sekretariat DPRD	100%	15.850.389.504	APBD
	Dokumen KUA, PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu	Sekretariat DPRD	6 Dok		
	Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti	Sekretariat DPRD	100%		
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang disetujui dan diundangkan	Sekretariat DPRD	10 dok Perda	2.577.162.451	APBD

Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	1 dokumen	9.259.300	APBD
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	10 dokumen	1.762.658.451	APBD
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	3 dokumen	335.399.650	APBD
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Sekretariat DPRD	3 dokumen	460.585.600	APBD
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Sekretariat DPRD	1 dokumen	9.259.450	APBD
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rekomendasi hasil pembahasan kebijakan anggaran	Sekretariat DPRD	5 rekomendasi	573.757.000	APBD
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD	1 dokumen	84.595.000	APBD
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekretariat DPRD	1 dokumen	31.140.500	APBD
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD	1 dokumen	147.235.000	APBD
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD	1 dokumen	30.450.500	APBD
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sekretariat DPRD	1 dokumen	280.336.000	APBD
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rekomendasi Pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang ditindaklanjuti	Sekretariat DPRD	62 rekomendasi	5.646.235.000	APBD
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Sekretariat DPRD	3 laporan	867.220.000	APBD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Sekretariat DPRD	3 laporan	867.220.000	APBD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat DPRD	3 laporan	867.220.000	APBD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Sekretariat DPRD	3 laporan	867.220.000	APBD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Sekretariat DPRD	3 laporan	867.220.000	APBD
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Sekretariat DPRD	1 dokumen	30.861.000	APBD
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan	Sekretariat DPRD	3 dokumen	867.220.000	APBD

	Anggaran				
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Sekretariat DPRD	1 dokumen	412.054.000	APBD
Peningkatan Kapasitas DPRD	Terwujudnya fasilitas dukungan terhadap peningkatan kapasitas DPRD yang optimal	Sekretariat DPRD	100%	3.195.339.600	APBD
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Luar kabupaten dan luar provinsi	1 dokumen	-	APBD
Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Luar kabupaten dan luar provinsi	3 dokumen	1.305.822.000	APBD
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sekretariat DPRD	24 dokumen	298.995.000	APBD
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sekretariat DPRD	3 orang	264.172.000	APBD
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Sekretariat DPRD	6 orang	274.732.000	APBD
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sekretariat DPRD	12 Dok	1.042.498.600	APBD
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Sekretariat DPRD	1 Dok	9.120.000	APBD
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dok laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Sekretariat DPRD	95 Dok	1.762.251.800	APBD
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Dalam kabupaten	1 laporan	69.370.000	APBD
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Sekretariat DPRD	1 Dok	84.987.000	APBD
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dalam kabupaten	3 dokumen	1.607.894.800	APBD
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Dok kode etik DPRD dan laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	Sekretariat DPRD	2 Dok	139.932.453	APBD
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Sekretariat DPRD	1 Dok	-	APBD
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRD	3 laporan	139.932.453	APBD
Fasilitasi Tugas DPRD	Dok laporan fasilitasi tugas DPRD	Sekretariat DPRD	35 Dok	1.955.711.200	APBD
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Luar kabupaten dan luar provinsi	10 dokumen	472.732.000	APBD
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Sekretariat DPRD	1 laporan	25.000.000	APBD

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sekretariat DPRD	12 Dok	753.455.000	APBD
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD	12 Dok	704.524.200	APBD
TOTAL ANGGARAN				49.273.580.052	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahun kedua pada Renstra Periode 2021-2026 yang digunakan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan dan APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2023 diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Paser maupun dengan Instansi terkait lainnya demi mewujudkan Kabupaten Paser Maju Adil Sejahtera.